

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Perdamaian dunia menjadi hal yang dicita-citakan oleh PBB untuk terjadi dan dipertahankan keadaannya. Bahkan, hal ini dimasukkan dalam piagam PBB sebagai tujuan organisasi. PBB sebagai wadah interaksi negara-negara dalam sistem internasional menjadi refleksi atas tarik-menarik kepentingan masing-masing negara. Anarkisnya sistem internasional tidak dapat dihindari pula dalam organisasi ini.

Perdamaian dunia merupakan keadaan dimana setiap negara mau menahan dirinya dan membantu negara lain agar masyarakatnya pun sejahtera layaknya negara mereka sendiri. Dalam fungsinya sebagai penjaga perdamaian dunia, PBB di dorong untuk bisa memberikan resolusi yang dianggap paling efektif untuk mencegah berbagai macam tindakan yang mengancam perdamaian dunia.

Namun, terciptanya konflik dan perang menjadi tantangan yang tidak dapat dihindarkan untuk menuju suatu keadaan yang damai. Membicarakan masalah konflik dan perang, perang di Afghanistan yang dimulai pada tahun 2001 menjadi salah satu contoh konflik yang bisa dianggap merubah pandangan tatanan

politikdunia internasional. Namun setelah beberapa tahun berjalan, terciptanya perdamaian seakan masih jauh dari harapan dan tujuan upaya perdamaian PBB.

Hal ini kemudian menjadi hal yang mendasar tentang pemilihan judul skripsi ini. Ada beberapa alasan lain mengenai pemilihan skripsi dengan judul “Hambatan PBB pada proses penyelesaian konflik di Afghanistan pada tahun 2001-2013”. Yang pertama adalah Peran PBB sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia, karena PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap negara-negara di dunia. PBB sebagai organisasi internasional yang didirikan karena pengalaman perang dunia II agar tidak terulang kembali serta kegagalan Liga bangsa-bangsa dalam mewujudkan perdamaian internasional dianggap belum bisa mencegah terjadinya konflik serta menyelesaikan konflik di sebuah negara. Hal ini terbukti dengan masih sering munculnya konflik-konflik dalam kapasitas negara, regional ataupun internasional. Kemudian keefektifan PBB juga dianggap masih rendah. Hal tersebut terlihat dengan proses perdamaian yang masih memakan waktu yang lama, sebagai contoh adalah Afghanistan yang memakan waktu lebih dari 10 tahun.

Yang kedua adalah PBB merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, serta berusaha untuk meredam berbagai konflik yang terjadi dengan menugaskan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi permasalahan keamanan

dunia. Untuk itu penulis tertarik mengetahui usaha-usaha apa yang telah dilakukan PBB dalam proses pencapaian perdamaian.

Yang ketiga adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh PBB dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Karena jika dilihat, PBB yang sudah menjalankan misinya sejak tahun 2002 dianggap masih gagal dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Untuk itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengenai hambatan yang terjadi di Afghanistan yang di hadapi oleh PBB.

Menjadi tema yang menarik untuk diangkat karena PBB yang memiliki otoritas pada dunia internasional memiliki banyak kendala yang harus dihadapi. Beberapa hambatanpun bertambah seiring dengan banyaknya kepentingan dari negara-negara Internasional serta makin berkembangnya masalah yang harus dihadapi oleh PBB terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan perdamaian internasional. Tidak hanya terkait dengan masalah-masalah eksternal dari PBB yang menjadi kendala yang harus dihadapi, namun masalah kelembagaan dalam tubuh PBB menjadi masalah dan tugas yang harus diselesaikan oleh PBB.

## **B. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ini bertujuan untuk Mengembangkan dan mengamalkan keilmuan selama belajar di perguruan tinggi serta menambah wawasan intelektual sebagai mahasiswa setelah menerima ilmu-ilmu selama kuliah.

2. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi PBB dalam upaya untuk menciptakan perdamaian serta pemulihan pasca konflik di Afghanistan.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan PBB di Afghanistan untuk menciptakan perdamaian.
4. Di samping itu penulisan ini juga di buat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **C. Latar Belakang Masalah**

PBB sebagai organisasi internasional memiliki peranan sebagai wadah dan pengatur kepentingan dari negara-negara dunia agar di satukan melalui mekanisme dan tata cara menuju satu kepentingan yang sama. Dalam tujuannya PBB memiliki fungsi utama untuk mempertahankan perdamaian dunia, karena memang dilatar belakangi oleh meletusnya tragedy Perang Dunia agar tidak terulang kembali. Untuk itu lahirlah PBB sebagai organisasi yang memiliki peranan sebagai penjaga perdamaian.

Dalam fungsinya sebagai penjaga perdamaian dunia, PBB di dorong untuk bisa memberikan resolusi yang dianggap paling efektif untuk mencegah berbagai macam tindakan yang mengancam perdamaian dunia. Dalam piagam PBB mengenai perdamaian dan kekerasan, dapatlah dipandang bahwa PBB menganut paham untuk

memilih digunakannya kekerasan dalam upaya menuju perdamaian dari pada mendorong negara-negara untuk bersikap damai<sup>1</sup>. Meskipun tujuan utama dari PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan nasional, dan asas utama yang dipakai adalah jalan damai untuk menyelesaikan perselisihan internasional, namun dipakainya kekerasan senjata jika dipandang perlu, maka hal tersebut tidak dibantahkan oleh PBB dan memang diminta oleh Dewan Keamanan PBB. Walaupun penggunaan ancaman juga dilarang, pada prakteknya sukar untuk menentukan bahwa suatu kasus akan menimbulkan ancaman, kecuali ancaman dalam arti yang luas yaitu ancaman terhadap perdamaian.

Perdamaian dunia menjadi hal yang dicita-citakan oleh PBB untuk terjadi dan dipertahankan keadaannya. Bahkan, hal ini dimasukkan dalam piagam PBB sebagai tujuan organisasi. PBB sebagai wadah interaksi negara-negara dalam sistem internasional menjadi refleksi atas tarik-menarik kepentingan masing-masing negara. Anarkisnya sistem internasional tidak dapat dihindari pula dalam organisasi ini. Dimana, negara yang high power akan memaksakan kepentingannya terhadap negara yang low power. Dengan kata lain, keadaan yang win-win solution sulit dicapai.

PBB memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan mempertahankan keamanan internasional. Melalui dewan keamanan segala bentuk

---

<sup>1</sup> Mr. R. Sumarto Djodiharjo U.N.O Perserikatan Bangsa-Bangsa Jakarta. Universitas Indonesia : 1987 Hal 14

penencegahan ataupun tindakan untuk menanggulangi ancaman terhadap perdamaian internasional di putuskan melalui sebuah kebijakan ataupun resolusi yang disetujui oleh berbagai pihak.

Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah yang harus diikuti oleh negara, baik yang sebagai anggota ataupun tidak apabila terlibat dalam suatu konflik. Negara-negara itu wajib untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan cara damai. Dewan keamanan dianggap sebagai wasit, mengingat tanggung jawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada tahun 2001, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan awal perang Afghanistan. Perang itu kemudian menjadi perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Ribuan warga sipil Afghanistan tewas dalam berbagai serangan pesawat tak berawak CIA serta dalam serangan malam hari yang dilakukan pasukan Amerika Serikat ke rumah-rumah penduduk Afghanistan.

Konflik internasional di Afghanistan dimulai pada tahun 2001 yang dipicu oleh Serangan 11 September dan terdiri dari tiga fase<sup>2</sup>. Pertama, menumbangkan Taliban (faksi politik dan agama ultrakonservatif yang memerintah Afghanistan dan memberikan perlindungan bagi al-Qaeda, pelaku serangan 11 September), yaitu hanya dua bulan. Tahap kedua, dari 2002 hingga 2008, ditandai dengan strategi

---

<sup>2</sup><http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1686268/Afghanistan-War> diakses tanggal 7/10/2014 3:17 PM

Amerika Serikat mengalahkan Taliban secara militer dan membangun kembali lembaga-lembaga inti dari negara Afghanistan. Tahap ketiga, giliran doktrin kontra klasik, dimulai pada tahun 2008 dan dipercepat dengan President Barack Obama tahun 2009 atas keputusan untuk meningkatkan kehadiran pasukan AS di Afghanistan.

Perang di Afghanistan atas invasi Amerika Serikat pada tahun 2001 merupakan salah satu bentuk peristiwa yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Oleh sebab itu PBB harus ikut andil dalam proses penyelesaian konflik atas perang di Afghanistan. PBB yang memiliki tanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan perdamaian internasional harus memberikan resolusi dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik di Afghansitan.

Afghanistan telah membuat sejarah konflik yang berkepanjangan, bahkan hingga saat ini. Konflik yang terjadi di Afghanistan tidak hanya membuat kerusakan infrastruktur namun juga telah melumpuhkan berbagai segi kehidupan baik ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Kondisi konflik di Afghanistan telah menarik perhatian negara-negara lain untuk ikut membantu menyelesaikan konflik negara tersebut. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) merupakan misi politik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB.

PBB hadir di Afganistan sejak 2002 melalui UNAMA (Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afganistan), yaitu dengan amanat menggalang

masyarakat antarbangsa dalam membantu pembangunan kembali Afganistan. UNAMA yang bergerak di bidang hak asasi manusia merupakan bidang utama yang mengawasi dan melaksanakan tindakan-tindakan preventif maupun represif apabila terjadi hal yang melanggar hak asasi manusia. UNAMA melakukan segala upaya untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia di Afghanistan atau hak asasi manusia setiap saat dan untuk semua orang. Tim dari UNAMA berupaya melaksanakan strategi ini melalui, subjek, melaporkan, advokasi, dan menjalin kerjasama dengan rekan-rekan kerja serta berdiskusi dengan pemerintah, militer, kelompok masyarakat maupun kelompok internasional. Dalam mencapai tujuannya, UNAMA menetapkan 4 prioritas bidang kerja seperti perlindungan terhadap rakyat sipil, perlindungan wanita dari kekerasan, perdamaian dan rekonsiliasi, dan penahanan<sup>3</sup>.

Misi utama dari UNAMA adalah meliputi mendukung rekonsiliasi nasional dan tugas-tugas di bawah Perjanjian Bonn bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan dan aktor internasional lainnya. Hal tersebut termasuk hak asasi manusia, hukum dan keadilan, isu gender serta juga memimpin operasi PBB dalam bidang bantuan kemanusiaan, bantuan pengungsi dan langkah-langkah rekonstruksi.

#### 1. Perlindungan Penduduk Sipil

---

<sup>3</sup><http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12285&language=en-US> di akses 8/10/2014 7:07 PM



UNAMA HAM melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak dari konflik bersenjata terhadap warga sipil; ini mencakup pemantauan independen dan tidak memihak, dokumentasi dan pelaporan insiden yang melibatkan hilangnya nyawa atau korban luka sipil; kegiatan advokasi untuk memperkuat perlindungan warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata; dan inisiatif untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, dan Konstitusi Afghanistan antara semua pihak dalam konflik. UNAMA HAM sistematis dokumen dan rilis pernyataan dan laporan publik tentang perlindungan warga sipil dan korban sipil.

## 2. Kekerasan terhadap Perempuan

Fokus UNAMA adalah memerangi kekerasan terhadap perempuan dan memungkinkan partisipasi mereka di ruang publik. Pada tanggal 11 Desember 2012, UNAMA Hak Asasi Manusia merilis laporan publik terbaru mendokumentasikan praktek-praktek tradisional yang berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan dan pelaksanaan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (hukum EVAW) oleh pemerintah Afghanistan. Laporan, berdasarkan penelitian negara-lebar luas, menemukan bahwa meskipun beberapa kemajuan dalam pelaksanaan hukum EVAW dirancang untuk melindungi perempuan Afghanistan dari kekerasan, penerapan hukum negara terus terhambat oleh "dramatis di bawah pelaporan" dan kurangnya investigasi terhadap sebagian insiden kekerasan yang menargetkan perempuan. Laporan ini merekomendasikan langkah-langkah untuk mengakhiri praktek-praktek

tersebut. UNAMA Hak Asasi Manusia terlibat dalam advokasi intensif temuan laporan dan rekomendasi, pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan hukum ERAW dan mendukung departemen provinsi 'urusan perempuan dan LSM perempuan di seluruh negeri.

### 3. Perdamaian dan Rekonsiliasi (Transitional Justice dan Impunity)

Hak Asasi Manusia UNAMA mendukung inisiatif untuk memobilisasi dan memperkuat perempuan dan organisasi masyarakat sipil, kelompok korban, media, pemerintah dan masyarakat internasional untuk mengejar proses yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas. Hak Asasi Manusia UNAMA bekerja dengan masyarakat sipil Afghanistan untuk memperkuat partisipasi efektif mereka dalam dialog politik besar dan di saat perdamaian, rekonsiliasi dan reintegrasi proses (Afghanistan Perdamaian dan Reintegrasi Program-APRP).

### 4. Penahanan

Dokumen Hak Asasi Manusia UNAMA dan pendukung tentang isu-isu penahanan konflik dan non-konflik terkait yang melibatkan pihak berwenang Afghanistan dan pasukan militer internasional. Hak Asasi Manusia menganjurkan untuk pelaksanaan rekomendasi untuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang luas didokumentasikan dalam laporan utama UNAMA di penahanan sewenang-wenang. Unit UNAMA HAM juga memantau penahanan di Direktorat Keamanan Nasional (NDS) dan Departemen Kehakiman fasilitas penahanan di seluruh negeri dan

menggunakan temuan dalam advokasi, dengan fokus pada pengobatan dan proses hukum hak tahanan.

Namun, misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) dalam laporan tahunan yang dirilis pada tahun 2014 mengatakan bahwa 2.959 warga sipil tewas di Afghanistan tahun lalu, termasuk 561 anak-anak dan 235 wanita. UNAMA menambahkan bahwa lebih dari 5.600 orang, termasuk 1.195 anak-anak dan 511 wanita, juga terluka pada tahun 2013. Laporan itu menambahkan bahwa korban sipil secara keseluruhan melonjak sebesar 14 persen pada tahun 2013 sebagai perbandingan, 2.768 warga sipil tewas dan 4.821 lainnya mengalami luka-luka pada tahun 2012<sup>4</sup>. Berdasarkan laporan investigasi dari Yayasan amal OS and TL Foundation yang dipublikasikan pada tahun 2011: Pasukan asing melakukan serangan antara 12 hingga 20 serangan setiap malam yang telah menyebabkan kerugian material dan kehilangan jiwa rakyat sipil yang lebih banyak jumlahnya dari angka-angka yang dinyatakan oleh PBB<sup>5</sup>.

Disamping dari pihak sipil Afghanistan, dua orang tentara Kanada tewas dalam peledakan di Kabul, Namun, tidak akan menghalangi misi Pasukan Penjaga Keamanan di Afghanistan. Hal itu diungkapkan Wakil Komandan Pasukan Bantuan

---

<sup>4</sup> "PBB: Korban Tewas Anak-anak dalam Perang Afghanistan Semakin Naik" <http://www.islampos.com/> Ahad 8 Rabiulakhir 1435 / 9 Februari 2014 05:54 di akses 8/10/2014 08:03 AM

<sup>5</sup> "Laporan UNAMA terkait korban sipil perang Afghan (akibat serangan penjajah) bertolak belakang dengan kenyataan" di kutip dari <http://www.arahmah.com/read/2012/02/08/17889-laporan-unama-terkait-korban-sipil-perang-afghan-akibat-serangan-penjajah-bertolak-belakang-dengan-kenyataan.html#sthash.H3wJ3EXL.dpuf> di akses 8/10/2014 08:06 AM

Keamanan Internasional (ISAF), Mayor Jenderal Andrew Leslie, di Kabul pada oktober 2003. Dua orang tentara Kanada tersebut tewas saat kendaraan mereka menginjak bahan peledak ketika melakukan patroli di perbukitan sekitar Kamp Julian. Tiga orang tentara lainnya, yang berada di kendaraan kedua, mengalami luka berat. Tewasnya kedua orang tentara tersebut menambah jumlah total tentara ISAF yang tewas sejak berdirinya pada Desember 2001, menjadi 82 orang<sup>6</sup>.

Selain itu, sebuah laporan yang dirilis oleh PBB mengungkapkan kalau hukuman bagi pelaku kriminalisasi pernikahan anak-anak, pernikahan secara paksa, bakar diri dan perkosaan serta kekerasan terhadap perempuan ternyata di bawah UU yang baru pada 2009 masih rendah. Masih dalam laporan PBB menunjukkan bahwa dari sekitar 1.670 insiden kekerasan terhadap perempuan di 16 provinsi, hanya 109 kasus atau sekitar tujuh persen yang diproses di pengadilan dengan menggunakan hukum EVAW (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)<sup>7</sup>. Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengatakan banyak kasus hanya diselesaikan melalui mediasi informal yang sering gagal untuk melindungi perempuan dari kekerasan lebih lanjut. Laporan itu juga mengatakan Mahkamah Agung Afghanistan telah menghukum 283 orang, sebagian besar

---

<sup>6</sup> “Penjagaan Perdamaian di Afghanistan Jalan terus” di kutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2003/10/03/05919842/Penjagaan-Perdamaian-di-Afghanistan-Jalan-terus> JUM'AT, 03 OKTOBER 2003 | 09:16 WIB diakses 10/10/2014 7:58 PM

<sup>7</sup> “PBB: Perlindungan Perempuan di Afghanistan Memprihatinkan” di kutip dari <http://www.tempo.co/read/abc/2013/12/08/173622/PBB-Perlindungan-Perempuan-di-Afghanistan-Memprihatinkan> diakses 8/19/2014 06:34 PM

perempuan dengan tuduhan zina, dalam jangka waktu setahun sampai Maret 2013. Pada 1996-2001 di era Taliban, perempuan dilarang dari sekolah, dipaksa untuk memakai burqa dan tidak diizinkan untuk mengambil bagian kegiatan publik.

Pelaksanaan pemilu yang berlangsung di Afghanistan pada tahun 2009, meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat Afghanistan. Sedikitnya 50 orang tewas saat warga mendatangi bilik-bilik suara untuk memilih presiden. Menurut Hanif Atmar, Menteri Dalam Negeri Afghanistan, setidaknya 9 polisi, 9 warga sipil, 14 aparat hukum serta 13 orang lainnya terluka saat pemilu Kamis kemarin. Selain itu, 8 tentara tewas dan 25 orang terluka akibat bom bunuh diri.

Pada masa transisi, dimana pada fase-fase menuju ke arah demokrasi sebagian rakyat Afghanistan menganggap Karzai telah gagal selama memimpin. Hamid Karzai penuh dengan kegagalan, ia banyak membuat kesalahan. Kabinetnya penuh dengan korup, semua menteri orang-orang oportunis, tidak profesional, janjinya tak pernah dipenuhi, dan kekerasan terus meningkat. Inilah salah satu gambaran atau fenomena yang tergambar dari situasi kondisi politik di Afghanistan yang sedang berlangsung pemilu presiden. Di beberapa tempat pelaksanaan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Setidaknya sekitar 30 tempat pengumutan suara tidak jadi dibuka karena alasan keamanan. Menurut pemantau asing, di Provinsi Zabul yang merupakan basis Taliban, warga lebih memilih tinggal di rumah. Di timur ibukota Kabul, sempat terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan anggota Taliban. Menurut

laporan Al-Jazeera, sedikitnya 26 warga Afghanistan tewas dalam 135 insiden serangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu Kamis kemarin.

Meskipun pemilih membanjiri TPS di Kabul dan utara Afghanistan pada pemilu tahun 2009. Namun dilaporkan bahwa partisipasi rendah di selatan dan timur, tempat Taliban merajalela<sup>8</sup>. Selain itu, ancaman kelompok Taliban tampaknya cukup berhasil memaksa pemilih untuk tidak memberikan suara, terutama di wilayah selatan dan timur Afganistan, pada pemilu presiden. Bahkan sejumlah tempat pemungutan suara tidak didatangi seorang pemilih pun. Seorang petugas pemilu di Kandahar, kota terbesar di selatan Afganistan, mengatakan partisipasi pemilih tampaknya turun hingga 40 persen dibandingkan dengan pemilu sebelumnya<sup>9</sup>. Rendahnya partisipasi pemilih di selatan akan memperkecil peluang Presiden Hamid Karzai, yang maju lagi dalam pemilu kali ini, dan menguntungkan rival terberatnya, mantan Menteri Luar Negeri Abdullah Abdullah.

Pada kasus lain, yaitu seputar tugas utama UNAMA mengenai penahanan Badan intelijen dan kepolisian Afghanistan telah menyiksa para tahanan secara sistematis termasuk anak-anak di sejumlah penjara, laporan PBB mengungkapkan pada tahun 2011. Sejumlah orang mengatakan kepada PBB bahwa Direktorat Keamanan Nasional (NDS) dan Polisi Nasional Afghanistan telah melakukan

---

<sup>8</sup> “AS Nilai Pemilu Afghanistan Berjalan Sukses” dikutip dari [http://m.news.viva.co.id/news/read/84304-as\\_nilai\\_pemilu\\_afganistan\\_berjalan\\_sukses](http://m.news.viva.co.id/news/read/84304-as_nilai_pemilu_afganistan_berjalan_sukses) Jum'at, 21 Agustus 2009, 09:26 WIB di akses 8/10/2014 9:02 PM

<sup>9</sup> “Kekerasan Sporadis Warnai Pemilu Presiden Afghanistan” di kutip dari <http://health.kompas.com/read/2009/08/21/06012269/Kekerasan.Sporadis.Warnai.Pemilu.Presiden.Afganistan> Jumat, 21 Agustus 2009 | 06:01 WIB di akses pada 8/10/2014 9:15 PM

pelecehan secara fisik atau mental terhadap para tahanan, dengan menggunakan pemukulan, listrik, dan mencabut kuku, menurut laporan tersebut. Wawancara pun dilakukan dengan 379 tahanan dan narapidana di 47 fasilitas yang berbeda oleh Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) dari Oktober 2010 hingga Agustus 2011.

Laporan itu mengatakan 324 dari para tahanan ditangkap dengan tuduhan kejahatan yang berkaitan dengan perang. 46 persen dari 273 tahanan yang diwawancarai ditangani oleh NDS dengan teknik interogasi melalui penyiksaan yang dipraktikkan sistematis di sejumlah fasilitas penahanan.<sup>10</sup> Selain penganiayaan fisik, yang mencakup penghinaan seksual, banyak tahanan juga mengatakan mereka telah ditahan di luar durasi maksimum yang diperbolehkan oleh hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperoleh kunjungan keluarga.

Kekerasan terhadap para tahanan masih berlanjut hingga periode tahun 2011-2012. Setidaknya, sebanyak 552 tahanan dari total 635 tahanan telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atas keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata di Afghanistan. UNAMA menemukan fakta bahwa sebanyak 377 dari 635 tahanan yang diwawancarai diduga telah mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak layak. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan melihat luka ataupun bekas luka dari para tahanan, UNAMA meyakini bahwa sebanyak 326 dari 377 tahanan yang

---

<sup>10</sup> “Kekerasan menjadi rumor yang beredar dari pusat-pusat penahanan di Afghanistan” di kutip dari <http://www.annah.com/read/2011/10/11/15707-kekerasan-menjadi-rumor-yang-bereedar-dari-pusat-pusat-penahanan-di-afghanistan.html#sthash.xOGcc3ID.dpuf> diakses 8/10/2014 07:23 PM

diwawancarai telah mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak wajar selama berada di dalam penjara.

Meski sudah beberapa tahun Perang di Afghanistan berlangsung, namun perang yang mengusung slogan pemberantasan terorisme itu tak juga mampu mewujudkan stabilitas dan perdamaian di negara tersebut. Terus meningkatnya problema yang mendera rakyat Afghanistan pasca kehadiran tentara asing di negaranya merupakan bukti kegagalan misi pasukan negara-negara Barat. Makin menguatnya infiltrasi kekuatan Taleban, produksi dan penyelundupan opium yang merajalela, lambatnya proses rekonstruksi dan terus bertambahnya korban di kalangan warga sipil merupakan sejumlah persoalan genting yang masih membayang-bayangi Afghanistan.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah yaitu; “Mengapa UNAMA belum bisa mewujudkan mandatnya?”

#### **E. KERANGKA BERFIKIR/TEORI**

##### Global Governance

Menurut Dirk Messner, global governance merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi dan merupakan mekanisme atau sarana institusional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara maupun non-negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi.



Sebagai sebuah tata cara kerjasama antara actor-actor dalam politik internasional di jelaskan oleh Dirk Messner bahwa, konsep global governance diartikan sebagai tata kelola global tanpa pemerintah (governance without government). Sehingga konsep ini menjadi sebuah tujuan pada terbentuknya tatanan global tanpa adanya kekuasaan sebagaimana yang ada pada sebuah institusi formal. Dalam Tata Kelola Global dan PBB, Weiss dan Thakur mengidentifikasi lima kesenjangan diantara banyaknya tantangan global saat ini dan tersedia solusi yang tidak memadai. Kesenjangan ini berkaitan dengan pengetahuan, norma, kebijakan, institusi, dan kepatuhan.<sup>11</sup>

Kesenjangan pengetahuan terkait dengan adanya ketidaksepakatan atas solusi terbaik dan solusi untuk suatu masalah, karena adanya masalah sifat, penyebab atau adanya masalah. Kesenjangan norma berkaitan dengan perilaku yang harus diikuti sesuai dengan yang diberikan atau disepakati. Kesenjangan kebijakan didefinisikan sebagai pengaturan tujuan, dan program yang disepakati dalam tindakan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan mencapai tujuan. Kesenjangan institusi diartikan sebagai adanya perbedaan lembaga atau orang yang menangani cukup baik dengan bidang masalah, dan orang-orang yang sering paling efektif menangani khusus masalah dan memiliki norma-norma yang tertanam dan konsensus di antara negara-negara anggota. Dan kesenjangan kepatuhan didefinisikan sebagai adanya actor yang mungkin tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan disepakati unsur kebijakan internasional

---

<sup>11</sup> <http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf>

Dalam tantangan yang harus di hadapi dalam global governance, lebih mendalam tantangan dalam global governance menjadi sebuah hambatan bagi organisasi internasional. Sesuai dengan pendapat dari Michael N . Barnet dan Martha Finnemore serta Nichole Ball bahwa adanya hambatan dalam organisasi internasional terutama terkait dengan pembangunan kembali negara pasca konflik, yaitu ;

1. Otoritas

Otonomi dan fungsi organisasi internasional relatif terbatas. Menurut Michael N . Barnet dan Martha Finnemore menyatakan bahwa organisasi internasional tidak serta merta menjadi aktor yang kuat dan memiliki otoritas penuh<sup>12</sup>. Karena organisasi internasional dibentuk secara sukarela oleh negara-negara anggotanya, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kerelaan anggotanya. Begitu juga halnya dengan kedaulatan masih dipegang negara, organisasi internasional tidak dapat memaksa dan menghukum negara-negara anggota yang melanggar hukum. Maka, negara anggota merupakan aktor yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional. Lemahnya otonomi dalam organisasi internasional dapat dilihat pada penyusunan anggaran, misalnya Majelis Umum PBB dapat membagi secara adil pengeluaran organisasi kepada anggotanya, namun apabila terdapat negara yang tidak melakukan kewajibannya, sanksi yang diberikan adalah kehilangan suara dalam Majelis dan akan berlaku jika telah menunggak lebih dari dua tahun.

---

<sup>12</sup>Barnett, Michael N & Finnemore, Martha. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations". 1999. *International Organization*. The MIT Press

Kelemahan ini terjadi karena organisasi organisasi internasional kurang memiliki sumber keuangan karena tidak bisa untuk menarik pajak.

## 2. Koordinasi

Konsep finansial dalam pembangunan kembali sebuah negara pasca konflik, Nichole menjelaskan bahwa dalam membangun kembali sebuah negara yang dalam keadaan pasca konflik dibutuhkan koordinasi antar negara pendonor. Koordinasi bantuan menurut Nichole Ball terkenal sangat sulit, terlebih lagi di negara yang tidak mengalami perubahan dari perang menuju damai. Dalam keadaan pasca konflik, kebutuhan dan kendala membesar. Juga pertimbangan politik yang bisa menghalangi koordinasi yang sangat penting dalam perang yang sedang berlarut-larut.

## 3. Staff

Di ungkapkan juga oleh Nichole Ball bahwa Kurang memadainya kemampuan para staff yang ditempatkan di daerah negara yang sedang dilanda perang. Seharusnya staff yang memiliki pengalaman mengenai misi perdamaian ditugaskan kembali ke misi perdamaian lain, sehingga telah memiliki kemampuan pengalaman dalam upaya misi perdamaian. Terlebih lagi diutamakan staff yang di tempatkan adalah mereka yang memiliki pengalaman yang sama di negara yang satu kawasan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nicole Ball "The Challenge of Rebuilding War-Torn Societies".2001.*Turbulent Peace*. Washington.D.C.Amerika Serikat Institute of Peace Press

## **F. HIPOTESIS**

1. Hambatan berupa adanya ketidakefektifan UNAMA dalam menerapkan dan memaksakan mandat ataupun misi programnya di Afghanistan.
2. Adanya kendala masalah kemampuan staff yang ditugaskan di Afghanistan serta jumlah staff yang relative terbatas.

## **G. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Dimana metode ini berusaha untuk memberikan data-data atau bukti-bukti yang terkait dengan kasus hambatan PBB dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Selain dengan menunjukkan data-data yang didapat, penulis berusaha memaparkan dan menggambarkan data-data melalui penjelasan terhadap temuan kasus-kasus yang ada.

Pemberian bukti yang jelas beserta penjelasan yang mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terkait mengenai bukti-bukti yang dipaparkan menjadi point penting mengenai mekanisme metode penelitian kuantitatif. Tujuan dari metodologi ini untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam menganalisis kasus hambatan PBB dalam kasus perdamaian di Afghanistan yang terjadi sejak 2001 berusaha memberikan data-data yang berupa penjelasan tentang hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam kasus Perang Afghanistan tahun 2001 yang melibatkan PBB sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dunia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penulisan yang penulis peroleh dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik sekunder adalah berupa surat kabar, artikel-artikel ilmiah, situs internet serta sumber-sumber valid dan relevan bagi penulis.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan penelitian skripsi ini rencananya akan terdiri dari lima bagian, bab I berupa pendahuluan akan berisi Latar belakang masalah, mengenai kegagalan PBB dalam proses penyelesaian konflik di Afghanistan yang mengakibatkan sulit dicapainya perdamaian di Afghanistan. Selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai pembatas kajian agar fokus terhadap penelitian ini, untuk mengupas masalah secara ilmiah maka peneliti menggunakan landasan teori terhadap bab ini, selanjutnya adalah metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, disamping memberikan bukti-bukti yang terkait mengenai faktor penghambat dalam

perdamaian, penulis berusaha memberikan penjelasan terkait dengan kondisi di Afghanistan yang dianggap sebagai hambatan dalam proses perdamaian.

Kemudian pada bab II dengan tema PBB dan Perdamaian Internasional akan membahas mengenai sejarah berdirinya PBB, dimana memang latar belakang utama didirikannya PBB adalah untuk mengatur semua kepentingan negara di dunia agar tercapai keamanan dan perdamaian internasional. Selain itu, tujuan utama dari PBB adalah sebagai penjaga keamanan dan perdamaian internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah Fungsi Dewan Keamanan PBB. Dewan keamanan PBB adalah badan PBB yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam masalah keamanan dan perdamaian di dunia. Selanjutnya yang ketiga mengenai Prinsip-prinsip PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, dalam PBB terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar oleh PBB sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik.

Selanjutnya pada bab III mengenai Konflik Afghanistan dan Upaya perdamaian berisi tentang latar belakang konflik Afghanistan 2001, dimulai dengan alasan konflik Afghanistan yang ditandai dengan invasi Amerika Serikat pasca tragedi 11 september hingga konflik-konflik mengenai perlawanan kelompok-kelompok Afghanistan terkait proses perdamaian dan pembangunan kembali Afghanistan. Selanjutnya adalah upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan, dengan program UNAMA, PBB berupaya menjalankan misi perdamaian di Afghanistan. Mulai dari urusan HAM hingga proses rekonsiliasi atau

pembangunan kembali Afghanistan, dengan perombakan pemerintahan di Afghanistan. Kemudian akan membahas Kondisi stabilitas Afghanistan sebelum dan sesudah perang tahun 2001, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai kondisi Afghanistan sebelum terjadinya perang dan setelah terjadinya perang. Terutama setelah dijalankannya program perdamaian PBB yaitu UNAMA. Dalam gambaran tersebut dapat ditarik tentang keberhasilan ataukah kegagalan dalam upaya misi perdamaian PBB di Afghanistan.

Pada bab IV akan membahas tentang Hambatan Perdamaian di Afghanistan. Pertama berisi kekuatan otoritas PBB, pada sub bab ini akan dibahas tentang seberapa besar kekuatan PBB terhadap negara-negara anggotanya untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh PBB. Kemudian akan membahas finansial sebagai berjalannya upaya perdamaian, disini akan dijelaskan masalah finansial yang menjadi alasan terciptanya perdamaian di daerah konflik. Kualitas dan kuantitas staff PBB, dalam sub bab ini akan dijelaskan bahwa kualitas dan kuantitas dari staff PBB akan sangat tergantung bagi terciptanya perdamaian di daerah konflik. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan PBB sebagai organisasi internasional, dalam sub ini akan dibahas tentang problematika dalam perkembangan PBB yang nantinya menjadi kelemahan PBB.

Bab V berisi kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan berupa jawaban penjelasan mengenai pertanyaan yang di jadikan dasar dalam rumusan masalah. Penulis berusaha memberikan jawaban mengenai hambatan-hambatan